

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dominasi Partai Aceh dalam perolehan kursi DPRA pada empat edisi Pemilu, yaitu 2009, 2014, 2019, dan 2024, tidak berlangsung secara statis, tetapi mengalami perubahan strategi sesuai dengan dinamika politik Aceh pascakonflik. Partai Aceh tetap menjadi partai lokal paling dominan di DPRA, meskipun perolehan kursinya mengalami fluktuasi, yaitu 33 kursi pada Pemilu 2009, 29 kursi pada Pemilu 2014, 18 kursi pada Pemilu 2019, dan 20 kursi pada Pemilu 2024. Pola tersebut menunjukkan bahwa dominasi Partai Aceh tidak hanya bersumber dari loyalitas eks-GAM/KPA, tetapi juga dari kemampuan partai mempertahankan basis sosial, memanfaatkan legitimasi historis, mengelola simbol perjuangan, dan beradaptasi dengan perubahan karakter pemilih.

Strategi politik Partai Aceh dalam empat edisi Pemilu DPRA menunjukkan pola yang berbeda. Pada Pemilu 2009, strategi yang menonjol adalah positioning dan ofensif, karena Partai Aceh menempatkan diri sebagai representasi politik eks-GAM sekaligus memperluas dukungan melalui momentum perdamaian dan euforia partai lokal. Pada Pemilu 2014, strategi Partai Aceh lebih bersifat defensif dan positioning, yaitu mempertahankan basis lama, memperkuat struktur lokal, serta menjaga identitas sebagai partai utama eks-GAM/KPA. Pada Pemilu 2019, strategi Partai Aceh cenderung defensif karena menghadapi penurunan kursi, fragmentasi internal, dan meningkatnya kompetisi

dengan partai lokal lain. Sementara itu, pada Pemilu 2024, Partai Aceh menerapkan strategi defensif, positioning, dan ofensif terbatas melalui penguatan figur lokal, konsolidasi jaringan, komunikasi digital, isu kekhususan Aceh, dan pendekatan terhadap pemilih muda.

Teknik penggalangan yang paling kuat dan paling bertahan dalam dominasi Partai Aceh adalah penggalangan persuasif berbasis identitas, simbol perjuangan, memori konflik, narasi MoU Helsinki, kekhususan Aceh, serta jaringan eks-GAM/KPA. Penggunaan Bendera Bulan Bintang, narasi perjuangan GAM, kedekatan dengan tokoh lokal, serta loyalitas grassroot menjadi instrumen penting dalam membangun kedekatan emosional dan persepsi bahwa Partai Aceh merupakan representasi perjuangan politik masyarakat Aceh pascaperdamaian. Dengan demikian, strategi yang paling difavoritkan oleh Partai Aceh bukan lagi koersif secara terbuka, melainkan strategi persuasif-hibrida yang memadukan kerja elektoral formal dengan modal historis, simbolik, dan jaringan sosial eks-GAM/KPA.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa dimensi koersif tidak sepenuhnya hilang dari lingkungan elektoral Partai Aceh. Pada fase awal pascakonflik, khususnya menjelang Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, masih terdapat data kekerasan, intimidasi, perusakan atribut kampanye, tekanan politik, dan efek gentar yang memengaruhi kompetisi elektoral. Pada Pemilu 2019, unsur koersif relatif melemah dan lebih banyak tersisa sebagai residu psikologis, loyalitas sosial, dan memori konflik di wilayah basis. Namun, pada tahun

elektoral 2024, dimensi koersif menunjukkan penguatan kembali dalam bentuk hibrida melalui tekanan simbolik, penggunaan simbol perjuangan secara masif, efek psikologis jaringan KPA/PA, serta sejumlah indikasi tekanan dan intimidasi elektoral di beberapa wilayah. Oleh karena itu, dominasi Partai Aceh tidak dapat dijelaskan sebagai hasil intimidasi semata, melainkan sebagai hasil kombinasi antara strategi elektoral formal, penggalangan persuasif, dan dimensi koersif yang berubah bentuk sesuai konteks politik pascakonflik.

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa teori strategi politik dan teori penggalangan intelijen memiliki fungsi yang saling melengkapi. Teori strategi politik menjelaskan arah dan bentuk strategi Partai Aceh melalui kategori ofensif, defensif, dan positioning. Sementara itu, teori penggalangan intelijen menjelaskan cara pengaruh politik tersebut bekerja pada masyarakat melalui pola persuasif dan koersif, terutama pada aspek emosi, sikap, opini, motivasi, loyalitas, memori konflik, rasa takut, dan persepsi risiko politik. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa dominasi Partai Aceh merupakan bentuk dominasi politik hibrida pascakonflik, yaitu dominasi yang dibangun melalui perpaduan antara strategi elektoral formal, legitimasi historis, simbol perjuangan, jaringan eks-kombatan, pengaruh sosial-psikologis, serta adaptasi politik terhadap perubahan masyarakat Aceh.

4.2. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari penelitian ini terletak pada pengembangan cara membaca dominasi partai politik lokal pascakonflik, khususnya Partai Aceh, yang tidak cukup dijelaskan hanya melalui teori strategi politik formal. Teori strategi

politik tetap relevan untuk menjelaskan langkah Partai Aceh dalam kategori ofensif, defensif, dan positioning. Namun, teori tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan mengapa dukungan terhadap Partai Aceh tetap bertahan dalam masyarakat yang memiliki memori konflik, kedekatan emosional dengan eks-GAM/KPA, serta keterikatan pada simbol perjuangan dan narasi kekhususan Aceh.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa teori penggalangan intelijen dapat digunakan sebagai perspektif pelengkap dalam ilmu politik untuk membaca dimensi pengaruh sosial-psikologis yang bekerja di balik strategi elektoral formal. Penggalangan persuasif menjelaskan bagaimana Partai Aceh membangun dukungan melalui narasi perjuangan, MoU Helsinki, identitas lokal Aceh, simbol Bendera Bulan Bintang, tokoh lokal, dan loyalitas grassroot. Sementara itu, penggalangan koersif menjelaskan bagaimana rasa takut, tekanan sosial, efek gentar, intimidasi elektoral, dan persepsi risiko politik masih memengaruhi perilaku politik masyarakat dalam konteks pascakonflik. Dimensi ini paling kuat tampak pada fase awal dominasi Partai Aceh, relatif melemah pada Pemilu 2019, tetapi menunjukkan penguatan kembali secara hibrida pada tahun elektoral 2024 melalui tekanan simbolik, efek psikologis, penggunaan simbol perjuangan, serta tekanan dan gangguan dalam proses pemilu di beberapa wilayah.

Dengan demikian, kontribusi teoritis penelitian ini adalah merumuskan pemahaman mengenai dominasi politik hibrida pascakonflik. Dominasi tersebut bukan hanya dibentuk oleh kekuatan organisasi partai, kampanye, rekrutmen

caleg, dan pengelolaan isu elektoral, tetapi juga oleh legitimasi historis, simbol perjuangan, jaringan eks-kombatan, pengaruh emosional, memori konflik, serta dimensi koersif yang berubah bentuk dalam memengaruhi persepsi politik masyarakat. Konsep ini memperlihatkan bahwa partai politik lokal yang lahir dari transformasi gerakan bersenjata tidak selalu dapat dibaca dengan kerangka partai elektoral biasa, karena partai tersebut membawa warisan jaringan, identitas, simbol, dan relasi kuasa pascakonflik.

Implikasi lainnya adalah bahwa studi tentang partai politik lokal di wilayah pascakonflik perlu menggabungkan analisis kelembagaan-elektoral dengan analisis pengaruh sosial-psikologis. Dalam kasus Partai Aceh, kategori ofensif, defensif, dan positioning menjelaskan bentuk strategi politiknya, sedangkan kategori penggalangan persuasif dan koersif menjelaskan bagaimana strategi tersebut diterima, dirasakan, dan direspons oleh masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperluas penggunaan teori strategi politik dengan menambahkan dimensi penggalangan sebagai alat baca terhadap loyalitas, identitas, rasa takut, simbol, dan memori kolektif dalam politik elektoral pascakonflik.

Secara akademik, penelitian ini juga memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya untuk menguji konsep dominasi politik hibrida pascakonflik pada kasus lain, baik di Aceh maupun di wilayah lain yang mengalami transformasi gerakan bersenjata ke dalam politik elektoral. Konsep ini dapat digunakan untuk membandingkan apakah dominasi partai pascakonflik lebih banyak dibentuk oleh

strategi elektoral formal, penggalangan persuasif berbasis identitas, atau dimensi koersif yang melemah, berubah bentuk, dan dapat menguat kembali dalam kompetisi politik lokal.

4.3. Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa dominasi Partai Aceh dalam politik elektoral Aceh tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan kemenangan partai dalam pemilu, tetapi juga sebagai hasil dari relasi historis, jaringan sosial, simbol perjuangan, loyalitas grassroot, dan pengaruh psikologis pascakonflik. Oleh karena itu, membaca dinamika politik Aceh memerlukan kepekaan terhadap konteks sosial-politik yang berbeda dengan daerah lain, terutama karena Partai Aceh lahir dari transformasi gerakan bersenjata ke dalam politik elektoral formal.

Bagi Partai Aceh, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi historis, simbol perjuangan, dan jaringan eks-GAM/KPA masih menjadi modal penting dalam mempertahankan dukungan politik. Namun, modal tersebut tidak lagi cukup apabila tidak disertai dengan penguatan kapasitas kelembagaan, regenerasi kader, rekrutmen politik yang terbuka, serta kemampuan merespons kebutuhan konkret masyarakat. Perubahan orientasi pemilih, terutama generasi muda dan pemilih yang lebih rasional, menuntut Partai Aceh untuk tidak hanya mengandalkan narasi perjuangan, tetapi juga memperkuat agenda programatik dalam isu ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat.

Bagi partai politik lokal lain di Aceh, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan fragmentasi, keterbatasan struktur, dan rendahnya konsolidasi basis menjadi faktor yang membuat Partai Aceh tetap lebih dominan. Oleh karena itu, persaingan politik lokal di Aceh tidak hanya ditentukan oleh keberadaan partai lokal secara formal, tetapi juga oleh kemampuan partai membangun jaringan sosial, figur lokal, isu yang relevan, dan kepercayaan publik secara berkelanjutan. Implikasi ini penting untuk memahami bahwa partai lokal tidak cukup hanya hadir sebagai peserta pemilu, tetapi harus memiliki basis sosial, kader, dan agenda politik yang jelas.

Bagi penyelenggara dan pengawas pemilu, temuan penelitian ini memberikan pemahaman bahwa tekanan dalam pemilu di wilayah pascakonflik tidak selalu muncul dalam bentuk pelanggaran administratif yang mudah dibuktikan. Tekanan tersebut dapat hadir melalui tekanan sosial, intimidasi tidak langsung, efek gentar, penggunaan simbol, dan persepsi risiko politik yang memengaruhi kebebasan pilihan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan dan pengawasan pemilu di Aceh perlu dibaca tidak hanya dari aspek prosedural, tetapi juga dari konteks sosial-psikologis, memori konflik, dan relasi kuasa lokal yang berkembang di wilayah tertentu.

Bagi Pemerintah Aceh dan pemangku kepentingan terkait, penelitian ini menunjukkan bahwa kekhususan Aceh, MoU Helsinki, dan simbol identitas lokal masih menjadi isu penting yang memengaruhi perilaku politik masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan isu kekhususan Aceh perlu dilakukan secara hati-hati,

transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik agar tidak hanya menjadi alat mobilisasi politik, tetapi juga benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan penguatan demokrasi lokal pascakonflik.

Dengan demikian, implikasi praktis utama penelitian ini adalah pentingnya menggeser dominasi politik yang bertumpu pada legitimasi historis dan simbol perjuangan menuju dominasi yang lebih programatik, institusional, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Partai Aceh tetap dapat mempertahankan posisinya sebagai kekuatan politik utama di Aceh, tetapi keberlanjutan dominasi tersebut akan semakin ditentukan oleh kemampuan partai melakukan adaptasi, regenerasi, penguatan kelembagaan, dan transformasi dari partai berbasis memori konflik menuju partai lokal yang lebih modern dan berorientasi pada kinerja politik.

4.4. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini berfokus pada strategi dominasi Partai Aceh dalam Pemilu DPRA 2009–2024, sehingga pembahasan tidak diarahkan secara mendalam pada dinamika Partai Aceh dalam pemilihan kepala daerah, pemilu DPRK, maupun pemilu nasional. Beberapa data politik di luar Pemilu DPRA digunakan hanya sebagai konteks pendukung untuk memahami dinamika sosial-politik Aceh pascakonflik.

Kedua, jumlah informan dalam penelitian ini masih terbatas dan belum sepenuhnya mencakup seluruh aktor yang terlibat dalam jaringan politik Partai Aceh, terutama unsur elite internal Partai Aceh, jaringan *underbow*, eks kombatan

di tingkat akar rumput, pemilih muda, dan masyarakat di seluruh wilayah basis Partai Aceh. Keterbatasan akses terhadap informan tertentu disebabkan oleh sensitivitas politik, keterbatasan waktu penelitian, serta karakter isu yang berkaitan dengan konflik, kekuasaan lokal, dan dinamika internal partai.

Ketiga, pembahasan mengenai dimensi koersif, tekanan psikologis, dan efek gentar sosial dalam politik Aceh memiliki keterbatasan dalam aspek verifikasi data. Hal ini disebabkan oleh sensitivitas isu, keterbatasan saksi, kehati-hatian informan dalam memberikan keterangan, serta konteks trauma konflik yang masih memengaruhi keterbukaan masyarakat dalam membicarakan pengalaman politik tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan bahasa yang hati-hati dan menempatkan temuan tersebut sebagai indikasi sosial-politik, bukan sebagai klaim hukum atau tuduhan institusional terhadap Partai Aceh.

Keempat, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi statistik terhadap seluruh pemilih Aceh. Temuan penelitian lebih diarahkan untuk memahami pola, makna, strategi, jaringan, dan dinamika pengaruh politik Partai Aceh dalam konteks politik lokal pascakonflik. Dengan demikian, penelitian ini masih membuka ruang bagi penelitian lanjutan dengan cakupan informan yang lebih luas, pendekatan komparatif, atau penggunaan data kuantitatif untuk memperkaya analisis mengenai perubahan perilaku politik masyarakat Aceh.

4.5. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta temuan utama mengenai dominasi politik Partai Aceh, rekomendasi utama penelitian ini adalah perlunya penguatan institusionalisasi Partai Aceh agar dominasi politik yang selama ini bertumpu pada legitimasi historis, simbol perjuangan, dan jaringan eks-GAM/KPA dapat bergerak menuju dominasi yang lebih programatik, demokratis, dan berbasis kinerja politik. Institusionalisasi dalam konteks penelitian ini tidak dimaknai secara abstrak, tetapi mencakup penguatan kaderisasi, rekrutmen politik, mekanisme organisasi, agenda programatik, regenerasi kepemimpinan, dan pelembagaan etika kompetisi politik.

Pertama, Partai Aceh perlu memperkuat kaderisasi yang lebih terbuka, terukur, dan berjenjang. Kaderisasi tidak cukup hanya didasarkan pada loyalitas historis, kedekatan jaringan, atau latar belakang perjuangan, tetapi juga perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas politik, kemampuan legislasi, pemahaman tata kelola pemerintahan, komunikasi publik, dan kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, transformasi eks-kombatan ke aktor politik sipil tidak hanya berhenti pada perubahan status formal, tetapi juga diikuti oleh perubahan kapasitas, gaya politik, dan orientasi kerja kelembagaan.

Kedua, Partai Aceh perlu memperkuat sistem rekrutmen calon legislatif yang lebih berbasis merit, integritas, rekam jejak, keterwakilan wilayah, dan kemampuan representasi. Rekrutmen politik yang terlalu bertumpu pada figur kuat, loyalitas jaringan, atau kedekatan personal berpotensi melemahkan institusionalisasi partai dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Partai Aceh perlu

membangun mekanisme seleksi internal yang lebih transparan, termasuk pemetaan kapasitas calon, evaluasi kinerja kader, dan penguatan pendidikan politik sebelum kader ditempatkan dalam kontestasi elektoral.

Ketiga, Partai Aceh perlu mengembangkan strategi politik yang lebih programatik. Narasi perjuangan, MoU Helsinki, kekhususan Aceh, simbol perjuangan, dan identitas eks-GAM/KPA masih menjadi modal politik penting, tetapi tidak lagi cukup untuk menjangkau perubahan karakter pemilih, terutama pemilih muda dan pemilih yang semakin rasional. Oleh karena itu, Partai Aceh perlu memperjelas agenda politiknya dalam isu ekonomi, lapangan kerja, pendidikan, pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam, tata kelola dana otonomi khusus, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara ini, legitimasi historis dapat diperkuat melalui kinerja politik yang nyata.

Keempat, Partai Aceh dan jaringan sosial-politik eks-GAM/KPA perlu memperkuat pelebagaan etika kompetisi politik yang menolak penggunaan tekanan, intimidasi, dan efek gentar dalam kontestasi elektoral. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dimensi koersif paling kuat muncul pada fase awal pascakonflik, relatif melemah pada Pemilu 2019, tetapi kembali menguat secara hibrida pada tahun elektoral 2024 melalui tekanan simbolik, efek psikologis, penggunaan simbol perjuangan, serta tekanan dan gangguan dalam proses pemilu di beberapa wilayah. Oleh karena itu, transformasi politik eks-GAM perlu diarahkan pada penguatan kompetisi demokratis, penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum dan politik formal, serta pembatasan penggunaan simbol atau

jaringan yang dapat menimbulkan tekanan psikologis terhadap lawan politik, penyelenggara pemilu, maupun masyarakat.

Kelima, partai politik lokal lain di Aceh perlu memperkuat kapasitas kelembagaan, basis sosial, kader muda, dan agenda politik yang lebih substantif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dominasi Partai Aceh tidak hanya disebabkan oleh kekuatan PA, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya konsolidasi dan fragmentasi partai lokal lain. Oleh karena itu, partai lokal lain perlu bergerak dari sekadar menjadi peserta pemilu menuju organisasi politik yang memiliki basis sosial, isu programatik, kader yang bekerja berkelanjutan, dan kemampuan membangun kepercayaan publik.

Keenam, Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat perlu memastikan bahwa isu kekhususan Aceh, pelaksanaan MoU Helsinki, dan implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh dikelola secara konsisten, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ketidakjelasan atau lambatnya penyelesaian isu kekhususan dapat terus menjadi ruang mobilisasi politik simbolik. Oleh karena itu, pengelolaan kekhususan Aceh perlu diarahkan pada kebijakan yang lebih konkret, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, tata kelola sumber daya, dan penguatan demokrasi lokal.

Ketujuh, Penyelenggara dan pengawas pemilu perlu memperkuat pemetaan wilayah rawan tekanan politik dengan memperhatikan aspek sosial-psikologis pascakonflik, termasuk tekanan sosial, intimidasi tidak langsung, efek

gentar, mobilisasi simbol, dan persepsi risiko politik, tanpa mengabaikan prinsip pembuktian dan mekanisme hukum yang berlaku.

Kedelapan, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini melalui pendekatan komparatif, baik dengan membandingkan Partai Aceh dengan partai lokal lain di Aceh, maupun dengan membandingkan pengalaman Aceh dengan wilayah pascakonflik lain yang mengalami transformasi gerakan bersenjata ke dalam politik elektoral. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk menguji lebih lanjut hubungan antara identitas politik, memori konflik, loyalitas historis, persepsi intimidasi, dan perilaku memilih masyarakat.

Dengan demikian, saran utama penelitian ini adalah mendorong transformasi dominasi Partai Aceh dari dominasi berbasis memori konflik, simbol perjuangan, dan jaringan eks-kombatan menuju dominasi yang lebih institusional, programatik, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Aceh pascakonflik.